

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya pula kami dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020. Sehubungan hal tersebut penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan Semester I Tahun 2019.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumedang khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga target capaian yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai harapan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin.

Sumedang, 2019
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang
Kepala,



UUS SUNDAWAN, SE.,MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19601023 198302 1 001

27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.
28. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini antara lain adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

1. Sebagai arah kebijakan dan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Sebagai Indikator Kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang 5 (lima) Tahun kedepan;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang.
4. Diketuinya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling tali-temali, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu.
6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.
7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.
8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat di tingkat bawah dan staf Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tentang visi dan misi Badan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.

9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman terhadap Badan.
10. Memudahkan pejabat/staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja BPKAD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, Renstra Kementerian Keuangan serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya tentang SOTK dan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPKAD Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKAD Tahun 2020 serta susunan garis besar isi dokumen.

Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2019 terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Terhadap Indikator RPJMD Semester I Tahun 2019

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1.	Opini BPK	WTP	-	-
2.	APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-
3.	Nilai Sakip	B	-	-
4.	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	96.15%	34.15%	35.5%
5.	Jumlah Inovasi	1	-	-
6.	Indeks Pembangunan Zona Integrasi/ Reformasi Birokrasi	65	-	-

Belum dapat terrealisasikan karena indikator tersebut baru dapat dilihat pada saat akhir tahun anggaran.

Adapun Capaian Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Rencana Program SKPD

Urusan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahun Renstra	Capaian Kinerja Program Semester I Tahun 2019	%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran (jumlah DPA yang Tidak bermasalah)	Persen	92	95.42	103
	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100	-	-
	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Persen	91	99	108
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian LK OPD	Persen	85	68.18	80
	Keakuratan Penatausahaan Aset (materialitas)	Persen	87	54.18	62

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

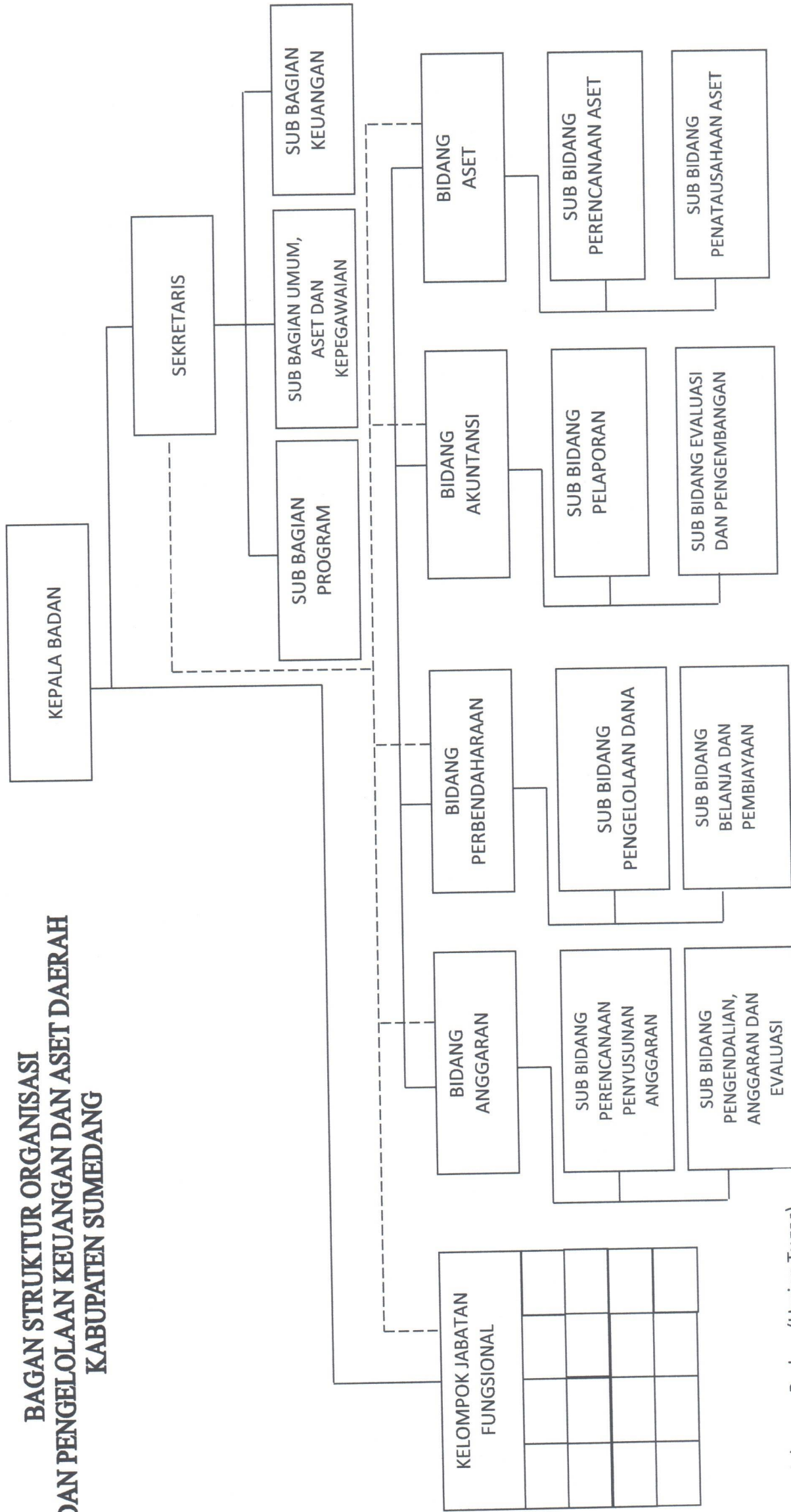
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD harus menjadi koordinator bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sehingga tercipta tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang diinginkan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, maka perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD, agar kualitas pelayanan semakin baik. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Capaian				Realisasi Capaian Semester I					Proyeksi Tahun 2020		
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023	
1	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	WTP
2	APBD Tepat Waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	-	Tepat Waktu
3	Nilai Sakip			B	BB	A	A	AA	AA	-	-	-	-	-	AA
4	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah			96,15	96,25	96,5	97	97,10	35,15						97,1
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi			65					-	-	-	-	-	-	

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**



Sesuai dengan Perbup (Uraian Tugas)
No. 26 Tahun 2016

- b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
- c. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
- d. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
- e. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
- f. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
- g. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
- h. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
- i. merumuskan dan mengkaji sistem informasi badan;
- j. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan;
- k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan/rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
- l. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja di bidang anggaran;
- b. mengendalikan rencana operasional kerja bidang anggaran;
- c. mengendalikan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. merumuskan dan mengendalikan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. merumuskan dan mengkaji kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah ;
 - g. merumuskan dan mengkaji pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
 - h. merumuskan dana transfer desa; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

4. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan anggaran kas pemerintah daerah;
- b. merumuskan rancangan/draft SPD;
- c. merumuskan penerbitan/ penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM SKPD;
- e. mengendalikan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengendalikan penyimpanan uang daerah;
- g. mengendalikan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;
- h. mengendalikan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. mengendalikan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j. mengendalikan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. mengendalikan penagihan piutang daerah;

- l. merumuskan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;
- m. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan anggaran;
- n. mengendalikan dan melaporkan dana transfer;
- o. fasilitasi pencairan bantuan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Dana; dan
- b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

5. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi;
- b. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
- c. merumuskan dan mengkaji kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. merumuskan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
- e. merumuskan dan mengendalikan pelaporan, evaluasi dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- f. merumuskan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa;
- g. mengkoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- h. merumuskan dan mengkaji pengolahan data pengelolaan keuangan daerah;
- i. merumuskan dan mengkaji laporan keuangan daerah;
- j. merumuskan penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah;

- k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, dan instansi lain terkait laporan keuangan daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

- a. Sub Bidang Pelaporan; dan
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

6. Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. merumuskan status penggunaan atas belanja modal/barang milik daerah;
- c. melaksanakan kajian/telaahan teknis terhadap rencana pemanfaatan barang milik daerah atas obyek Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
- d. meneliti/menalaah dokumen permohonan rencana pinjam pakai terhadap barang milik daerah;
- e. melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan barang milik daerah yang sah berupa sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- f. meneliti dokumen-dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan tukar-menukar;
- g. meneliti data administrasi terhadap barang milik daerah yang akan dihibahkan;
- h. meneliti dan menyiapkan kelengkapan data administratif barang daerah yang akan dijadikan penyertaan modal dan pemerintah daerah;
- i. melaksanakan pengkajian dan penelitian data barang milik daerah yang akan dilakukan pemusnahan;

- j. meneliti dokumen-dokumen kelengkapan administratif terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan;
- k. melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap barang milik daerah;
- l. meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik barang milik daerah berupa rumah Negara;
- m. merumuskan laporan barang milik daerah;
- n. merumuskan barang milik daerah terhadap tuntutan ganti rugi; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan Aset
- b. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kabupaten Sumedang terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerjanya dalam upaya memenuhi target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2018 dimana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah selama Tahun 2017 masih mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

1. Dengan seringnya terjadi perubahan sistem dan aturan pengelolaan keuangan dan aset serta terkadang adanya perubahan petugas pengelola keuangan dan aset SKPD, sehingga kompetensi SDM yang baru masih kurang optimal;
2. Struktur APBD belum ideal;
3. Implementasi Akuntansi berbasis Akrual belum optimal;
4. Penatausahaan aset daerah belum optimal

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.

3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strengths)

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;
Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan nyaman sangat menunjang kelancaran pekerjaan.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;
Dengan jumlah kekuatan personil sebanyak 74 orang telah dirasakan cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah.
4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;
Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai merupakan modal dasar yang potensial dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama seluruh stakeholder.
5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BPKAD.
Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai panduan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelemahan (weakness)

1. Kualitas SDM masih belum memadai;
Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional.

2. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah;
Fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Sistem Aplikasi SIPKD dan SIMDA BMD masih belum terintegrasi sehingga masih terdapat ketidaksesuaian.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;
Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah;
Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh SKPD sebagai perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar.
2. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.
Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna. (SIPKD dan SIMDA BMD)

b. Ancaman (Threats)

1. Koordinasi antar Dinas terkait belum memadai;
Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan khususnya.
Keterlambatan penyampaian berkas SPP/SPM, lap.
Pertanggungjawaban dll.
2. Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
Kondisi tersebut menjadi kendala dalam mengevaluasi apakah implementasi sudah sesuai dengan perencanaan atau belum.
3. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
Kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pengelolaan transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya.
4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah;
Kondisi tersebut dapat berakibat fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.
5. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset yang tidak diprediksi.
Hal ini menjadi kendala ketika anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	<p>Strategi Kd I : Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</p>	<p>Strategi Kd II : Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman</p>
	K E L E M A H A N	<p>Strategi Kd III : Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang</p>	<p>Strategi Kd IV : Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman</p>

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*kekuatan/strengths*, *kelemahan/weaknesses*, *peluang/opportunities*, dan *tantangan/threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

TABEL 2.5
ANALISA SWOT
ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Faktor Eksternal	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah; 3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar Dinas terkait belum memadai; 2. Belum optimalnya integrasi antara system informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset; 3. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah; 5. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset yang tidak diprediksi. 	
Faktor Internal	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; 2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai; 3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai; 4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik; 5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BPKAD. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Baik. 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Koordinasi antar OPD Terkait Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan; 2. Peningkatan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM masih belum memadai; 2. Belum Optimalnya Fungsi Pengelolaan Aset Daerah; 3. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi antara Pengelolaan Keuangan dan Aset. 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu Adanya Evaluasi dan Penataan Ulang Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah; 2. Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program-program Pelatihan dan Sertifikasi.
---	---	--

Penentuan strategi- strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam rangka terlaksanannya pengelolaan keuangan dengan baik dan pendayagunaan aset daerah secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka BPKAD Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan pelaporan keuanganan aset daerah yang lebih baik;
2. Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan;
3. Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.

Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Badan BPKAD Kabupaten Sumedang adalah :

3. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan;
5. Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
7. Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
8. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program- program pelatihan dan sertifikasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019, pada Program/Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulaidari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja yang dilaksanakanoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.6.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Sumedang

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)		
1	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	4 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	4 Dokumen	200.000.000,00		
2	Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD.	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	4 Dokumen	95.000.000,00	Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD.	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	4 Dokumen	95.000.000,00		
3	Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran	BPKAD	Jumlah Tim Verifikator	Tim Verifikator sebanyak 45 orang dan 55 SKPD	192.000.000,00	Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran	BPKAD	Jumlah Tim Verifikator	Tim Verifikator sebanyak 45 orang dan 55 SKPD	192.000.000,00		
4	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	BPKAD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	2 Dokumen	425.000.000,00	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	BPKAD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	2 Dokumen	425.000.000,00		
5	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	330.000.000,00	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	330.000.000,00		

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.-)	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.-)
6	Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang	BPKAD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	1 Raperda dan 1 Raperbup	367.000.000,00	Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang	BPKAD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	1 Raperda dan 1 Raperbup	367.000.000,00	
7	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang	BPKAD	Jumlah Dokumen APBD Murni	1 Raperda dan 1 Raperbup	505.067.587,46	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang	BPKAD	Jumlah Dokumen APBD Murni	1 Raperda dan 1 Raperbup	544.000.000,00	
8	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	185.000.000,00	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	185.000.000,00	
9	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	2 Dokumen	252.000.000,00	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	2 Dokumen	252.000.000,00	
10	Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	52.000.000,00	Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	52.000.000,00	
11	Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	173.000.000,00	Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	173.000.000,00	
12	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	Raperbup/Rakepbup/Raperda	405.000.000	PENYUSUNAN KEBIYAKAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	Raperbup/Rakepbup/Raperda	405.000.000	
13	Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	Kabupaten Sumedang	Buku Saku Murni dan Perubahan	2 Paket (APBD Induk dan APBD Perubahan)	184.475.000	SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG APBD (Induk dan Perubahan)	Kabupaten Sumedang	Buku Saku Murni dan Perubahan	2 Paket (APBD Induk dan APBD Perubahan)	184.475.000	
14	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	1 Kali sosialisasi	100.000.000	SINERGITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	1 Kali sosialisasi	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)		
15	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Sumedang	Jumlah TAPD	4 Dokumen	284.604.000	PENINGKATAN KAPASITAS TAPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah TAPD	4 Dokumen	284.604.000		
16	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	2 Dokumen	146.031.200	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	2 Dokumen	146.031.200		
17	Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	1 Paket	210.797.180,00	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	1 Paket	210.797.180,00		
18	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	1 Paket	431.420.920,00		BPKAD	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	1 Paket	281.420.920,00		
19	Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah SKPD yang dikelola	4 Laporan	338.097.700,00	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah SKPD yang dikelola	4 Laporan	338.097.700,00		
20	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	1 Paket	180.607.000,00	Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	1 Paket	366.607.000,00		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)		
21	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	BPKAD	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	3 dokumen	350.000.000,00	Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	BPKAD	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	3 dokumen	350.000.000,00		
22	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	BPKAD	Jumlah Dokumen Pengesahan	1 Laporan	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Pengesahan	1 Laporan	200.000.000,00		
23	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	1 Raperda /Dokumen	250.000.000,00	Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	1 Raperda /Dokumen	250.000.000,00		
24	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Raperbub /Dokumen	314.000.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Raperbub /Dokumen	350.000.000,00		
25	Sinergitas Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	56 SKPD	500.000.000,00	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	56 SKPD	500.000.000,00		
26	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual	Kabupaten Sumedang	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	57 SKPD	100.000.000,00	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Sumedang	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	57 SKPD	100.000.000,00		
27	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD yang dikelola	55 SKPD, 55 Dokumen	110.000.000,00	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD yang dikelola	55 SKPD, 55 Dokumen	120.000.000,00		
28	Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen LRA	1 sistem	142.000.000,00	Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen LRA	1 sistem	150.000.000,00		
29	Inventarisasi Aset	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD yang dikelola	1 dokumen	80.000.000,00	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD yang dikelola	1 dokumen	80.000.000,00		
30	Penyusunan Neraca Aset Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	1 dokumen	50.000.000,00		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.-)	
31	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	150 orang	200.000.000,00	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	150 orang	200.000.000,00	
32	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	8 Dokumen	350.000.000,00	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	8 Dokumen	350.000.000,00	
33	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	2 Dokumen	72.000.000,00	Bimbingan Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	2 Dokumen	75.000.000,00	
34	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	5 Dokumen	300.000.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	5 Dokumen	300.000.000,00	
35	Identifikasi Belanja Modal SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	5 Dokumen	60.000.000,00	Identifikasi Belanja Modal SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	5 Dokumen	75.000.000,00	
	JUMLAH				7.014.990.387					7.161.922.800	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan Perencanaan Kegiatan, maka dalam proses perencanaan selain berdasarkan usulan dan kebutuhan SKPD, juga harus memperhatikan usulan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, maka proses penyusunan Dokumen Perencanaan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan musrenbang tingkat Kabupaten, sehingga diharapkan dalam aplikasi proses pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan yang ditetapkan tadi sesuai dan sinergis dengan aspirasi masyarakat.

Namun demikian semua usulan kegiatan BPKAD Tahun 2020, tidak ada satu pun usulan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat, sehingga semua usulan program/kegiatan berdasarkan usulan SKPD yang mengacu pada Renstra SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 memiliki Tujuan "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)". Apabila ditelaah, Misi tersebut sesuai dengan sembilan program Nawa cita khususnya point ke 2 yaitu "Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan".

Selain itu, terdapat juga keterkaitan dengan Misi Provinsi Jawa Barat 2019-2023 khususnya Misi ke-5, yaitu "Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, dengan Sasaran Misi yaitu Birokrasi Juara, APBD Juara, ASN Juara dan BUMD Juara."

Dari hasil telaahan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan adanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset yang ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang profesional.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Kabupaten Sumedang

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
1	Meningkatkan tata kelola pengembangan yang secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang	RPJMN 2015-2019	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, maka perlu dijabarkan kembali menjadi sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2020.

Tujuan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu);
2. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*).

Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas internal perangkat daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sumedang adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023*** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

SEJAHTERA Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

AGAMIS Sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai- nilai agama yang diyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAJU Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

PROFESIONAL *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

KREATIF masyarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor- sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga- tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu **“Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat”** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan **Tujuan** yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sebagai berikut:

“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)”

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan kiranya perlu dipahami upaya mencapai tujuan dan sasaran. Penjelasan Tujuan tersebut menggambarkan tata nilai yang mempunyai kecermatan dengan mutu pelayanan. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mengandung arti sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan Keuangan** mengandung arti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- b. **Berkualitas** mengandung arti mempunyai kualitas, bermutu (baik)
- c. **Akurat** mengandung arti setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- d. **Tepat Waktu** mengandung arti betul atau lurus sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2
RUMUSAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Kode	Organisasi / SKPD : 3.01.03.03. -BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021											
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif								
											4	5	6	7	8	9	10	
1		2	3															
3.01.03.		KEUANGAN																
3.01.03.3.01.03.03.01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
3.01.03.3.01.03.03.01.01.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Kabupaten Sumedang	100 %;	6.628.072.340,00	APBD Kabupaten											7.173.897.305,00
			Input : Jumlah Dana															
			Output : Jasa Telephone, Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran															
3.01.03.3.01.03.03.01.01.02		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Jumlah Dana	Kabupaten Sumedang	100 %;	3.975.338.000,00	APBD Kabupaten											4.352.771.800,00
			Output : Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran, ATK, Cetak Penggandaan, Makan Minum, Jasa Operator dan Jasa Pelayanan															
			Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran															
3.01.03.3.01.03.03.01.01.03		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input : Jumlah Dana	Kabupaten Sumedang	100 %;	27.500.000,00	APBD Kabupaten											
			Output : Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Outcome : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur dan Jumlah Dana															
3.01.03.3.01.03.03.01.01.04		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Input : Jumlah Dana	Kabupaten Sumedang	100 %;	645.150.000,00	APBD Kabupaten											
			Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasi															
			Outcome : Sinerginya Pembangunan															

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.01.01	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Publikasi Dekorasi (pameran) Dokumentasi</p> <p>Outcome : Tersampainya Informasi Pembangunan</p>	Kabupaten Sumedang	Spanduk 75 Meter Pameran 75 Buah Publikasi Media 100%	110.000.000,00	APBD Kabupaten		Spanduk 75 Meter Pameran 75 Buah Publikasi Media 100%	121.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.01.01	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Tenaga Operasional Pengamanan</p> <p>Outcome : Terciptanya Pengamanan Kantor</p>	Kabupaten Sumedang	1.00 Paket 100%	200.035.000,00	APBD Kabupaten		1.00 Paket 100%	220.038.500,00
3.01.03.3.01.03.03.01.01	Penyediaan Jasa Kebersihan	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jasa Kebersihan</p> <p>Outcome : Terciptanya Kebersihan di Ruang terbuka hijau</p>	Kabupaten Sumedang	1.00 Paket 100%	292.435.000,00	APBD Kabupaten		1.00 Paket 100%	321.678.500,00
3.01.03.3.01.03.03.01.01	Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Barang ATK dan Cetakan</p> <p>Outcome : Lancarnya Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah</p>	Kabupaten Sumedang	1.00 Paket 100%	375.320.000,00	APBD Kabupaten		1.00 Paket 100%	412.852.000,00
3.01.03.3.01.03.03.01.02	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Profil BPKAD</p> <p>Outcome : Tersedianya Informasi tentang BPKAD</p>	Kabupaten Sumedang	1.00 Dokumen 100%	180.000.000,00	APBD Kabupaten		1.00 Dokumen 100%	190.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.01.02	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : SOP BPKAD</p>	Kabupaten Sumedang	1.00 Dokumen	80.000.000,00	APBD Kabupaten		1.00 Dokumen	88.000.000,00

Kode	Usuar/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Outcome : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100%				100%	
3.01.03.3.01.03.03.02.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur; Input : Jumlah Dana	Kabupaten Sumedang	100 %;	1.679.929.340,00	APBD Kabupaten		- 1 Paket - 1 Paket 100%	1.858.405.374,00
3.01.03.3.01.03.03.02.01	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Output : - Peralatan Kantor - Perlengkapan Kantor Outcome : Terciptanya kenyamanan kantor	Kabupaten Sumedang	1 paket	48.729.000,00	APBD Kabupaten		1 paket 100%	80.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.02.01	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Output : Penataan Halaman Kantor/gedung kantor Outcome : Terciptanya kenyamanan kantor	Kabupaten Sumedang	1 Paket	27.676.000,00	APBD Kabupaten		1 Paket 100%	30.443.600,00
3.01.03.3.01.03.03.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Gedung Kantor yang di Pelihara Outcome : Terciptanya kenyamanan kantor	Kabupaten Sumedang	1 Paket	232.650.000,00	APBD Kabupaten		1 Paket 100%	240.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Jumlah Dana Output : Kendaraan Dinas Yang Dipelihara Outcome : Lancarnya tugas kedinasan	Kabupaten Sumedang	1 Paket	73.149.340,00	APBD Kabupaten		1 Paket 100%	80.464.274,00
3.01.03.3.01.03.03.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara Outcome : Terciptanya kenyamanan Kantor/Gedung Kantor	Kabupaten Sumedang	3.00 Jenis 100%	110.000.000,00	APBD Kabupaten		3.00 Jenis 100%	121.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.02.01	Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Input : Jumlah Dana	Kabupaten Sumedang						

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Output : Rumah Dinas Outcome : Lancarnya pelayanan jabatan/kebidinasan		1.00 unit 100%				1.00 Unit 100%	
3.01.03.3.01.03.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;		100 %;	228.270.000,00				184.162.000,00
3.01.03.3.01.03.03.03.0C	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Input : Jumlah Dana Output : Pakaian Dinas beserta perlengkapan Outcome : Meningkatnya Disiplin aparatur	Kabupaten Sumedang	108.00 stel 100%		APBD Kabupaten		108.00 stel 100%	
3.01.03.3.01.03.03.03.0C	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Jumlah Dana Output : Pakaian Batik	Kabupaten Sumedang	108.00 stel 100%	61.390.000,00	APBD Kabupaten		108.00 stel 100%	68.123.000,00
3.01.03.3.01.03.03.03.0C	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Input : Jumlah Dana Output : Pakaian Olahraga Outcome : Meningkatnya Disiplin aparatur	Kabupaten Sumedang	108.00 stel 100%	105.490.000,00	APBD Kabupaten		108.00 stel 100%	116.039.000,00
3.01.03.3.01.03.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;		100 %;	189.035.000,00				167.508.131,00
3.01.03.3.01.03.03.05.0C	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur	Kabupaten Sumedang	108 orang 100%	189.035.000,00	APBD Kabupaten		108 orang 100%	167.508.131,00
3.01.03.3.01.03.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;		100 %; 100 %;	385.000.000,00				423.500.000,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.06.00	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Laporan Kinerja BPKAD</p> <p>Outcome : Terevaluasinya Kinerja SKPD</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Laporan Keuangan BPKAD</p> <p>Outcome : Terevaluasinya Keuangan SKPD</p>	Kabupaten Sumedang	6.00 Dokumen 100%	302.500.000,00	APBD Kabupaten	8	6.00 Dokumen 100%	332.750.000,00
3.01.03.3.01.03.03.06.00	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Laporan Keuangan BPKAD</p> <p>Outcome : Terevaluasinya Keuangan SKPD</p>	Kabupaten Sumedang	12.00 dokumen 100%	82.500.000,00	APBD Kabupaten		12.00 dokumen 100%	90.750.000,00
3.01.03.3.01.03.03.07.00	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	<p>01 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Renstra, Renja, Pra RKA, RKA DPA, DPPA</p> <p>Outcome : Terarahnya pelaksanaan Pembangunan</p>	Kabupaten Sumedang	100 %, 100 %;	143.000.000,00				157.300.000,00
3.01.03.3.01.03.03.07.00	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	<p>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Data Kepegawaian yang dikelola</p> <p>Outcome : Terevaluasinya kinerja pegawai</p>	Kabupaten Sumedang	6.00 Dokumen 100%	143.000.000,00	APBD Kabupaten		6.00 Dokumen 100%	157.300.000,00
3.01.03.3.01.03.03.08.00	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	<p>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Data Kepegawaian yang dikelola</p> <p>Outcome : Terevaluasinya kinerja pegawai</p>		100 %;	27.500.000,00				30.250.000,00
3.01.03.3.01.03.03.08.00	Pengelolaan Data Kepegawaian	<p>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Data Kepegawaian yang dikelola</p> <p>Outcome : Terevaluasinya kinerja pegawai</p>	Kabupaten Sumedang	4.00 Dokumen 100%	27.500.000,00	APBD Kabupaten		4.00 Dokumen 100%	30.250.000,00
3.01.03.	KEUANGAN				7.015.033.000,00				8.494.772.780,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.15.01	Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	<p>Output : Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan</p> <p>Outcome : Optimalnya fungsi Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020</p> <p>Input : Jumlah Dana</p>	Kabupaten Sumedang	2 Dokumen 100%	52.000.000,00	APBD Kabupaten	2 Dokumen 100%	55 SKPD dan 1 PPKD 100%	52.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.01	Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD	<p>Output : Jumlah RKA SKPD/PPKD Perubahan T.A. 2020</p> <p>Outcome : Meningkatnya efektivitas Rancangan Penggunaan Anggaran</p> <p>Input : Jumlah Dana</p>	Kabupaten Sumedang	55 SKPD dan 1 PPKD 100%	173.000.000,00	APBD Kabupaten		55 SKPD dan 1 PPKD 100%	173.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.01	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	<p>Output : Jumlah DPPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2020</p> <p>Outcome : Meningkatnya Efektivitas Rancangan Penggunaan Anggaran</p> <p>Input : Jumlah Dana</p>	Kabupaten Sumedang	55 SKPD dan 1 PPKD 100%	305.000.000,00	APBD Kabupaten		55 SKPD dan 1 PPKD 100%	405.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.01	Penyebutan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	<p>Output : Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakebbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah</p> <p>Outcome : Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakebbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah</p> <p>Input : Jumlah Dana</p>	Kabupaten Sumedang	6 Raperbup/Rakebbup/Raperda 100%	184.475.000,00	APBD Kabupaten		6 Raperbup/Rakebbup/Raperda 100%	184.475.000,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.01.03.3.01.03.03.15.01	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Output : Buku Saku APBD Murni dan Perubahan APBD</p> <p>Outcome : Tersedianya Buku Saku dan Poster Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan P-APBD</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi</p> <p>Outcome : Meningkatnya pemahaman aparaturnya tentang perencanaan penganggaran daerah</p>	Kabupaten Sumedang	2 Jenis Buku 100%	100.000.000,00	APBD Kabupaten		2 Jenis Buku 100%	100.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.15.01	Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer</p> <p>Outcome : Tercapainya pengendalian dan pelaporan dana transfer</p>	Kabupaten Sumedang	4 Dokumen 100%	210.797.180,00	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100%	210.797.180,00	
3.01.03.3.01.03.03.15.01	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Dokumen Laporan Keuangan Pemda</p> <p>Outcome : Terukurnya kinerja keuangan Pemda</p>	Kabupaten Sumedang	1 dokumen 100%	200.000.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen 100%	200.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.15.01	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<p>Output : Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019</p> <p>Outcome : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	Kabupaten Sumedang	1 Raperda	200.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Raperda	250.000.000,00	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.15.02	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD APBD	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019</p> <p>Outcome : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	Kabupaten Sumedang	1 Raperbup	300.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Raperbup	350.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.02	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui</p> <p>Outcome : Laporan Keuangan berbasis akrual yang akurat dan tepat waktu</p>	Kabupaten Sumedang	1 Sistem	100.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Sistem	100.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.02	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Tersedianya Buku RKBMD dan RKPBMMD</p> <p>Outcome : Terinventarisasi Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan BMD</p>	Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	72.000.000,00	APBD Kabupaten		2 Dokumen	75.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.02	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah</p> <p>Outcome : Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang</p>	Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	300.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.02	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi</p>	Kabupaten Sumedang	56 Berita Acara	110.000.000,00	APBD Kabupaten		56 Berita Acara	120.000.000,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.01.03.3.01.03.03.15.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	<p>Outcome : tersusunnya neraca asset</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi</p> <p>Outcome : Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi</p> <p>Outcome : "Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020"</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah Peserta Bimtek</p> <p>Outcome : meningkatnya wawasan pengurus dan penyimpanan barang</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah system yang dikelola</p>	Kabupaten Sumedang	100% 2 Dokumen 100%	284.604.000,00	APBD Kabupaten		100% 2 Dokumen 100%	284.604.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.15.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD		Kabupaten Sumedang	2 Dokumen 100%	146.031.200,00	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100%	146.031.200,00	
3.01.03.3.01.03.03.15.02	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kabupaten Sumedang	150 orang 100%	200.000.000,00	APBD Kabupaten		150 orang 100%	200.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.15.02	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Kabupaten Sumedang	1 Sistem	331.420.920,00	APBD Kabupaten		1 Sistem	450.000.000,00	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.15.03	Pengelolaan Kas Daerah	<p>Outcome : Pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan semakin baik dan benar</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah</p> <p>Outcome : Tersedianya data yang akurat</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : jumlah peserta pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>Outcome : meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur akuntansi keuangan daerah</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Laporan Realisasi APBD Bulanan T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Triwulan I,II T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Semester I T.A 2020, Laporan-laporan kepada Pemerintah Pusat</p> <p>Outcome : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD</p> <p>Outcome : Tertibnya Penatausahaan BMD</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah Dokumen Identifikasi BMD</p>	Kabupaten Sumedang	100%	238.097.700,00	APBD Kabupaten	100%	1 Dokumen	338.097.700,00
3.01.03.3.01.03.03.15.03	Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah		Kabupaten Sumedang	55 SKPD	350.000.000,00	APBD Kabupaten		100%	500.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.03	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan		Kabupaten Sumedang	24 Dokumen	300.000.000,00	APBD Kabupaten		24 Dokumen	350.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.03	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah		Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	180.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	350.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.03	Identifikasi Belanja Modal SKPD		Kabupaten Sumedang	100%	60.000.000,00	APBD Kabupaten		100%	75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.01.03.3.01.03.03.15.03	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	<p>Outcome : Tersusunnya Belanja Modal SKPD</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui</p> <p>Outcome : terpeliharanya pengembangan aplikasi sistem pengelolaan asset</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Tersedianya rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset</p> <p>Outcome : Meningkatkan kualitas pelaporan BMD</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Tersedianya dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu</p> <p>Outcome : Tersusunnya neraca aset</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan SKPD</p> <p>Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah</p>	Kabupaten Sumedang	100%	142.000.000,00	APBD Kabupaten		100%	150.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.15.03	Inventarisasi Aset		Kabupaten Sumedang	100%	80.000.000,00	APBD Kabupaten		100%	68.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.15.03	Penyusunan Neraca Aset Daerah		Kabupaten Sumedang	100%	50.000.000,00	APBD Kabupaten		100%	68.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.15.04	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah		Kabupaten Sumedang	100%	180.607.000,00	APBD Kabupaten		100%	403.267.700,00	
	TOTAL SUMBER DANA APBD								-	
	TOTAL SUMBER DANA APBD Prov								-	
	TOTAL SUMBER DANA APBN								-	
	TOTAL				13.643.105.340,00				15.668.670.085,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

4.1. Rencana Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai berikut:

A. Belanja Program pada setiap SKPD:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

B. Belanja Urusan SKPD:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.2. Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dari Program diatas serta sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
6. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
7. Penyedia Jasa Kebersihan

8. Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang
9. Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah (Profil SKPD)
10. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9. Penyedia Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Komputer

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
2. Penilaian Kinerja Aparatur
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah raga

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

F. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

G. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

1. Pengelolaan data kepegawaian

H. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2. Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
3. Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran
4. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
5. Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD
6. Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD
9. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
10. Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
11. Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD
12. Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
13. Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD
14. Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peningkatan Kapasitas TAPD
16. Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer
17. Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan
18. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
19. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
20. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
21. Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
22. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD
23. Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah
24. Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD
25. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

26. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
27. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
28. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
29. Pengelolaan Kas Daerah
30. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
31. Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
32. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan
33. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah
34. Identifikasi Belanja Modal SKPD
35. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah
36. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah
37. Inventarisasi Aset
38. Penyusunan Neraca Aset Daerah

Tabel. 4.1

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.	PENUNJANG URUSAN										13.643.105.340,00	15.668.670.085,00		
3.01.3.01.03.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Sumedang	01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;	100 %;	Jasa Telephone, Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan, 21.000 Kwh, 50000 Kb	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.975.338.000,00	4.352.771.800,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.01.3.01.03.03.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik										636.218.000,00	687.739.800,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.3.01.03.03.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kabupaten Sumedang	Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran, ATK, Cetak Penggandaan, Mekan Minum, Jasa Operator dan Jasa Pelayanan		12.00 bulan		Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.428.680.000,00	1.571.548.000,00		
3.01.3.01.03.03.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kabupaten Sumedang	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		19.00 Surat Kabar		Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur	100%	27.500.000,00	30.250.000,00		
3.01.3.01.03.03.01.006.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kabupaten Sumedang	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		75.00 kali		Sinerginya Pembangunan	100%	645.150.000,00	709.665.000,00		
3.01.3.01.03.03.01.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi			Kabupaten Sumedang	Publikasi Dekorasi (pameran) Dokumentasi		Spanduk 75 Meter Pameran 75 Buah Publikasi Media		Tersampainya Informasi Pembangunan	100%	110.000.000,00	121.000.000,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.3.01.03.03.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan			Kabupaten Sumedang	Tenaga Operasional Pengamanan	1.00 Paket		1.00 Paket	Terciptanya Pengamanan Kantor	100%	200.035.000,00	220.038.500,00		
3.01.3.01.03.03.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan			Kabupaten Sumedang	Jasa Kebersihan	1.00 Paket		1.00 Paket	Terciptanya Kebersihan di Ruang terbuka hijau	100%	282.435.000,00	321.678.500,00		
3.01.3.01.03.03.01.014.	Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang			Kabupaten Sumedang	Barang ATK dan Cetakan	1.00 Paket		1.00 Paket	Lancarnya Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	375.320.000,00	412.852.000,00		
3.01.3.01.03.03.01.023.	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah			Kabupaten Sumedang	Profil BPKAD			1.00 Dokumen	Tersedianya Informasi tentang BPKAD	100%	180.000.000,00	190.000.000,00		
3.01.3.01.03.03.01.024.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)			Kabupaten Sumedang	SOP BPKAD			1.00 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	80.000.000,00	88.000.000,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.3.01.03.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;	100 %;					1.679.929.340,00	1.858.405.374,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.01.3.01.03.03.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kabupaten Sumedang			- Peralatan Kantor - Perlengkapan Kantor	- 1 Paket - 1 Paket	Terciptanya kenyamanan kantor	100%	1.306.487.500,00			
3.01.3.01.03.03.02.008.	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor			Kabupaten Sumedang			Penataan Halaman Kantor/gedung kantor	1 paket	Terciptanya kenyamanan kantor	100%	48.729.000,00	80.000.000,00		
3.01.3.01.03.03.02.011.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kabupaten Sumedang			Gedung Kantor yang di Pelihara	1 Paket	Terciptanya kenyamanan kantor	100%	27.676.000,00	30.443.600,00		
3.01.3.01.03.03.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kabupaten Sumedang			Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	1 Paket	Lancarnya tugas kedinasan	100%	232.650.000,00	240.000.000,00		
3.01.3.01.03.03.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor			Kabupaten Sumedang			Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	3.00 Jenis	Terciptanya kenyamanan Kantor/Ge-dung Kantor	100%	73.149.340,00	80.464.274,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.3.01.03.03.0 2.016.	Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas			Kabupaten Sumedang			Rumah Dinas	1.00 unit	Lancarnya pelayanan jabatan/ke dinas	100%	110.000.000,00	121.000.000,00		
3.01.3.01.03.03.0 3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;	100 %;					228.270.000,00	184.162.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.01.3.01.03.03.0 3.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan			Kabupaten Sumedang			Pakaian Dinas beserta perlengkapan	108.00 stel	Meningkatnya Disiplin aparatur	100%	61.390.000,00	-		
3.01.3.01.03.03.0 3.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kabupaten Sumedang			Pakaian Batik	108.00 stel	Meningkatnya Disiplin aparatur	100%	61.390.000,00	66.123.000,00		
3.01.3.01.03.03.0 3.004.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga			Kabupaten Sumedang			Pakaian Olahraga	108.00 stel	Meningkatnya Disiplin aparatur	100%	105.490.000,00	116.039.000,00		
3.01.3.01.03.03.0 5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;	100 %;					189.036.000,00	167.508.131,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	
3.01.3.01.03.03.05.002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	108 orang	Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur	100%	167.508.131,00			
3.01.3.01.03.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			01	100 %; 100 %;					423.500.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.01.3.01.03.03.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD			Kabupaten Sumedang			Laporan Kinerja BPKAD	6.00 Dokumen	Terevaluasi Kinerja SKPD	100%	332.750.000,00			
3.01.3.01.03.03.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD			Kabupaten Sumedang			Laporan Keuangan BPKAD	12.00 dokumen	Terevaluasi Keuangan SKPD	100%	90.750.000,00			

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.	KEUANGAN										7.015.033.000,00	8.494.772.780,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.01.03.3.01.03.03.16.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		01 Ketepatan Waktu Proses Penganggaran; 02 Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran; 03 Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan aturan; 04 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD; 05 Keakuratan Penatausahaan Aset (Materials);	100 %; 93 %; 92 %; 90 %; 88 %;					7.015.033.000,00	8.494.772.780,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.0 3.15.001.	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD			Kabupaten Sumedang			Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	1 Perbup	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	200.000.000,00	200.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.0 3.15.002.	Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2020	55 DPPA SKPD, 1 DPPA PPKD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	95.000.000,00	95.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.0 3.15.003.	Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran			Kabupaten Sumedang			Jumlah Tim Verifikator dan Pengelola Program SKPD yang mengikuti kegiatan	45 orang verifikator dan 55 orang Pengelola Program SKPD	Meningkatnya Pengetahuan Tim Verifikator dan Pengelola Program SKPD mengenai perencanaan dan penganggaran	100%	192.000.000,00	192.000.000,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.0 3.15.004.	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD			Kabupaten Sumedang			Jumlah Nota Kesepakatan dan (KUA dan PPAS) Murni	2 Dokumen	Optimalnya fungsi Nota Kesepakatan dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021	100%	425.000.000,00	425.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.0 3.15.005.	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen RKA SKPD/PPKD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	Meningkatnya efektifitas Rancangan Penggunaan Anggaran	100%	330.000.000,00	330.000.000,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.0 3.15.006.	Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			Kabupaten Sumedang			Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Raperbup tentang Perjabaran Perubahan APBD T.A. 2020	1 Raperda dan 1 Raperbup	Optimalnya fungsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperbup Kabupaten Sumedang tentang Perjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	100%	267.000.000,00	367.000.000,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Hasil Program		Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.03.15.011.	Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD			Kabupaten Sumedang	Jumlah DPPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2020	55 SKPD dan 1 PPKD	Meningkatnya Efektivitas Rancangan Penggunaan Anggaran	100%	173.000.000,00	173.000.000,00				
3.01.03.3.01.03.03.15.012.	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah			Kabupaten Sumedang	Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah	6 Raperbup/Rakepbup/raperta	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah	100%	305.000.000,00	405.000.000,00				
3.01.03.3.01.03.03.15.013.	Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tertang APBD			Kabupaten Sumedang	Buku Saku APBD Murni dan Perubahan APBD	2 Jenis Buku	Tersedianya Buku Saku dan Poster Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan P-APBD	100%	184.475.000,00	184.475.000,00				

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.0 3.15.030.	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah system yang dikelola	1 Sistem	Pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan semakin baik dan benar	100%	331.420.920,00	450.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.0 3.15.031.	Pengelolaan Kas Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	Tersedianya data yang akurat	100%	238.097.700,00	338.097.700,00		
3.01.03.3.01.03.0 3.15.033.	Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah peserta pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	55 SKPD	meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur akuntansi keuangan daerah	100%	350.000.000,00	500.000.000,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.01.03.3.01.03.0 3.15.034.	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan			Kabupaten Sumedang			Laporan Realisasi APBD Bulanan T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Triwulan I, II, T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Semester I T.A 2020, Laporan-laporan kepada Pemerintah Pusat	24 Dokumen		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	300.000.000,00	350.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.0 3.15.035.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	1 Dokumen		Tertibnya Penatausahaan BMD	100%	180.000.000,00	350.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.0 3.15.036.	Identifikasi Belanja Modal SKPD			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	1 Dokumen		Tersusunnya Belanja Modal SKPD	100%	60.000.000,00	75.000.000,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.0 3.15.037.	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	1 Sistem	terpeliharanya pengembangan aplikasi sistem pengelolaan aset	100%	142.000.000,00	150.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.0 3.15.038.	Inventarisasi Aset			Kabupaten Sumedang			Tersedianya rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelaporan BMD	100%	80.000.000,00	68.750.000,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
TOTAL													13.643.105.340,00	15.668.670.085,00	

